

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (Agensi Teori)

Teori agensi adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak (*agent*) setuju untuk bertindak dengan persetujuan pihak yang lain (*principal*). Zimmerman pada tahun 1997 menyatakan bahwa *agency problem* terjadi pada semua organisasi, baik sektor publik maupun sektor swasta. Pada sektor swasta, *agency problem* terjadi antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent*. Pada sektor publik, *agency problem* terjadi antara pejabat yang terpilih rakyat sebagai *agent* dan para pemilih (masyarakat) sebagai *principal*. *Agency problem* muncul ketika prinsipal mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen, atau dalam perjanjian kontrak kerja antara prinsipal dan agen. Dalam hubungan kontrak kerja, pihak *agent* secara moral bertanggung jawab dalam memaksimalkan keuntungan *prinsipal*, namun di sisi lain *agent* juga berkepentingan dalam memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri (Girsang, 2015).

Menurut Meisser yang dikutip dari Girsang (2015), terdapat 2 permasalahan agensi yaitu adanya informasi asimetris dimana agen secara umum memiliki lebih banyak informasi dari prinsipal dan terjadinya konflik kepentingan akibat ketidaksamaan tujuan, di mana agen tidak selalu bertindak sesuai dengan tujuan kepentingan prinsipal. akuntabilitas publik adalah sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinsipal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Girsang, 2015). Pemerintah dalam hal ini bertanggungjawab memberikan informasi yang transparan dan akuntabel, salah satunya yaitu melalui kepatuhan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan sekaligus pengungkapan dan penyajian laporan sewajar mungkin.

Jensen dan Meckling pada tahun 1976, menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*, sehingga *agent* tidak selamanya mengikuti keinginan *principal*. Hubungan keagenan tersebut juga terjadi di Pemerintahan antara rakyat sebagai *agent* dan pemerintah sebagai *principal*. Pemerintah dapat melakukan kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa dan mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan *monitoring* oleh prinsipal atas apa yang dilakukan oleh *agent*. Laporan keuangan dan pengungkapan informasi kepada publik adalah salah satu bentuk alat monitoring untuk mengurangi *agency cost*. Dalam konsep pemberian informasi melalui internet kepada publik dapat dijadikan alat untuk mengurangi konflik keagenan (Girsang, 2015).

2.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan keuangan yang berkualitas dan tepat menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan untuk mengelola organisasi.

Laporan keuangan yang pada mulanya hanyalah sebagai alat penguji dari pekerjaan bagian pembukuan, untuk selanjutnya juga digunakan sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan, kemudian dengan hasil penilaian tersebut pihak – pihak yang berkepentingan membuat suatu keputusan. Jadi laporan keuangan diperlukan untuk mengetahui posisi keuangan dari suatu perusahaan dan hasil – hasil yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut selama kurun waktu tertentu.

2.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

2.3.1 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Basis Akuntansi yang digunakan dengan laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas di terima di Rekening Kas Umum Negara / Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah atau entitas pelaporan (PP No.71 tahun 2010).

2.3.2 Peran Auditor internal

Kualitas laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan auditing yang dilakukan oleh para auditor, baik auditor internal maupun auditor eksternal. Istilah auditing sering digunakan untuk menguraikan tentang luas kegiatan dalam masyarakat kita.

Jenis-jenis audit yang ada pada umumnya menunjukkan karekteristik kunci yang mencakup dalam defnisi auditing yang telah disampaikan di atas. Jenis-jenis audit

tersebut adalah audit Laporan Keuangan, audit Kepatuhan dan audit operasional. Sesuai dengan judul artikel kami, maka akan kami uraikan secara singkat hanya mengenai Audit Laporan Keuangan.

Audit Laporan Keuangan berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hasil audit laporan keuangan tersebut didistribusikan kepada para pengguna dalam spectrum yang luas, seperti para pemegang saham, kreditor, kantor pemerintah dan masyarakat umum melalui laporan auditor atau laporan keuangan.

2.3.3 Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Sedangkan Informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Krismiaji, 2013)

Dengan demikian sistem informasi akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas.

2.4 Penelitian terdahulu

Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah :

Tabel 2.4
Daftar Peneliti Terdahulu

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Elvana Kartika (2014)	Pengaruh Kompetensi SDM dan Penerapan SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kompetensi SDM dan penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2.	Angga dwi permadi (2013)	Pengaruh penerapan SAK Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	SAK Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3.	Nurillah (2014)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok)	Sumber daya manusia, penerapan SAK, Pemanfaatan teknologi informasi dan system, pengendalian intern berpengaruh pada kualitas laporan keuangan daerah.
5.	Lusi Novita Sari (2014)	Pengaruh kapasitas SDM dan peran auditor internal	Kapasitas SDM dan Peran auditor internal

		pada kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah	berpengaruh pada kualitas laporan keuangan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
7.	Linna Yuliana (2016)	Pengaruh pemahaman SAP, pengalaman kerja dan SIA terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Pemahaman SAP dan pengalaman kerja dan SIA berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

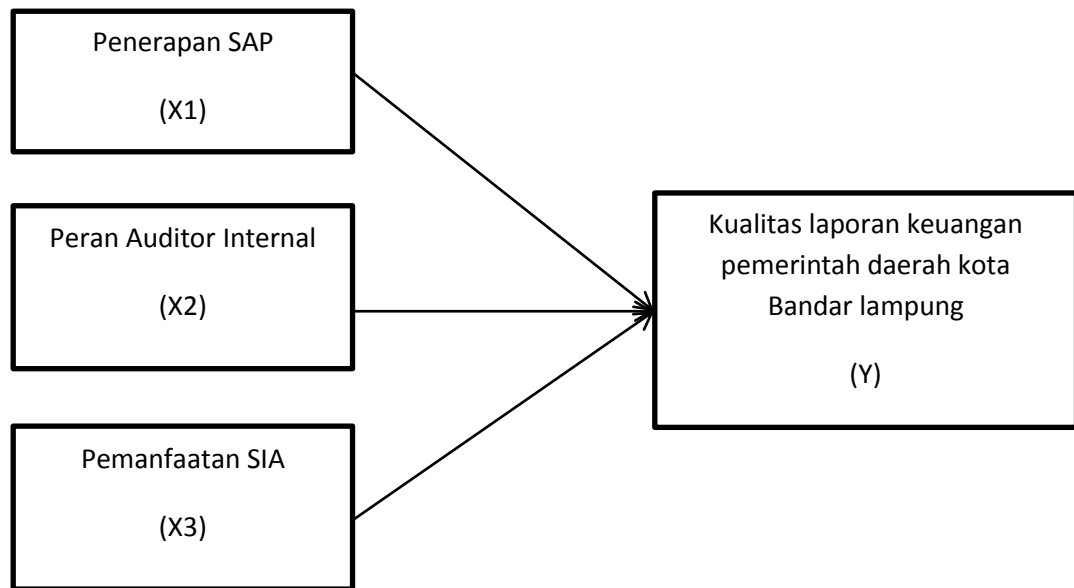
2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, peran auditor internal, pemanfaatan system informasi akuntansi mempengaruhi kualitas laporan keuangan dimana ketiga variabel tersebut berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya fasilitas jaringan sistem informasi akuntansi yang dirancang khusus untuk proses penyusunan laporan keuangan mulai dari pencatatan jurnal, buku besar sampai kepada laporan keuangan semua telah tersistem dengan menggunakan komputerisasi akan mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan dan menghemat waktu dalam proses penyusunannya. Dengan demikian diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi informasi yang diharapkan dan

mampu meningkatkan kualitas hasil dan tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu.

Untuk memperjelas pengaruh dari masing-masing variabel tersebut, maka disajikan model sebagai berikut :



Gambar 2.5

2.6 Bangunan Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian serta merupakan pernyataan yang paling spesifik. Dengan kata lain, hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti, yang kemudian akan di uji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan. Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka yang menjadi hipotesis penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

2.6.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung

Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini “tidak wajar dan/atau *disclaimer*” diantaranya disebabkan oleh kelemahan penerapan standar akuntansi pemerintah yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait (Badan Pemeriksa Keuangan, 2015). (kartika, 2014) dan (nurillah,2014) membuktikan secara empiris bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatanwaktuan dan keterandalan. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin lebih lanjut menguji dengan hipotesis diajukan sebagai berikut :

Ha₁ = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kota Bandar Lampung

2.6.2 Peran Auditor Internal pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung

Auditor Internal merupakan suatu aktivitas independen, keyakinan obyektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian internal audit membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi (Yuliani, 2010)

Dalam memainkan perannya auditor internal dibagi menjadi dua kategori utama yaitu jasa assurance yang merupakan penilaian obyektif auditor internal atas bukti untuk memberikan pendapat atau kesimpulan independen mengenai proses, sistem atau subyek masalah lain dan jasa konsultasi yang merupakan pemberian saran, dan

umumnya dilakukan atas permintaan khusus dari klien, dalam melaksanakan jasa konsultasi, auditor internal harus tetap menjaga obyektifitasnya dan tidak memegang tanggung jawab manajemen. Adanya peran auditor internal yang baik akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti ingin lebih lanjut menguji dengan hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

Ha2: Peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.6.3 Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Linna, 2016).

Penelitian Sari (2014) menemukan hasil bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dengan adanya pemanfaatan sistem informasi akuntansi ini di dalam proses penyusunan laporan keuangan, pemerintah Kabupaten Jembrana diharapkan dapat memudahkan proses penyusunan laporan keuangan dan memberikan manfaat bagi pemerintah demi mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas.

Yuliani, (2010) menemukan hasil bahwa ada pengaruh signifikan positif pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. setiap dilakukan peningkatan pemanfaatan sistem

informasi akuntansi keuangan daerah, maka akan meningkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Dengan demikian sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Sedangkan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah sebagai salah satu sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh masing-masing SKPD untuk meningkatkan dalam proses penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti ingin lebih lanjut menguji dengan hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

Ha₃ = Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kota Bandar Lampung